

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan diintegrasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat diperoleh melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan rencana kerja yang memenuhi aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang setiap tahun dilakukan secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan, melalui mekanisme perencanaan partisipatif (*participatory planning*) sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1181/M.PPN/02/2006 dan Nomor 050/244/SJ, tanggal 14 Pebruari 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2006-2011 (Perda No. 2 Tahun

2006) yang mengacu pula pada RKPD Propinsi Jawa Barat tahun 2007. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, RKPD memuat evaluasi pembangunan tahun lalu, isu strategis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004; Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

1.1.1 Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Visi Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 14 tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan adalah "***Depok Kota Pendidikan, Permukiman, Perdagangan dan Jasa, yang relegius dan Berwawasan Lingkungan***". Sedangkan visi Pemerintah Kota, yang merupakan visi Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2006-2011, adalah : "***Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan***". Visi ini mempunyai 2 fokus utama; ***Pertama : Melayani***, mengandung arti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah; ***Kedua : Mensejahterakan***, mengandung arti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan

pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi melayani dan mensejahterakan tersebut telah dirumuskan empat misi Pemerintah Kota Depok, yaitu :

Pertama, Mewujudkan *Pelayanan* yang ramah, cepat dan transparan;

Kedua, Membangun dan mengelola *Sarana dan Prasarana* yang cukup, baik dan merata;

Ketiga, Mengembangkan **Perekonomian masyarakat, Dunia usaha dan Keuangan daerah;**

Keempat, Meningkatkan *Kualitas Keluarga, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat* berlandaskan nilai-nilai agama.

1.2. TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

1.2.1 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2007 bertujuan untuk menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dan pengalokasian sumberdaya untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok pada khususnya dan peningkatan pembangunan regional dan nasional pada umumnya.

1.2.2 Sasaran

Sasaran RKPD adalah menjadi acuan dan pedoman pembangunan daerah Kota Depok.

1.2.3 Fungsi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Depok berfungsi sebagai pedoman bagi :

- a. SKPD Pemerintah Kota Depok dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahun 2007;
- b. Penyusunan RAPBD Pemerintah Kota Depok tahun 2007.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2007 berlandaskan kepada peraturan berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- j. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010;
- p. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Kota Depok tahun 2002-2012;
- q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Jawa Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok tahun 2007, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, Tujuan, Sasaran dan Fungsi, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan RKPD.

BAB II. EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN

Menjelaskan Evaluasi Kinerja sesuai dengan Renstra Kota Depok tahun sebelumnya;

BAB III. RANCANGAN KERANGKA PEMBANGUNAN

Memuat Kerangka ekonomi daerah dan Isue Strategis Kota Depok;

BAB IV. ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana, yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; pagu anggaran indikatif program pembangunan.

BAB V. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan Program Prioritas dan Agenda pembangunan berupa arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan tahun 2007

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

Mengemukakan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan yang diisyaratkan

BAB VII. PENUTUP

Memuat kesimpulan dan harapan pelaksanaan pembangunan tahun 2007.

BAB II EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN

Renstra Kota Depok sebagai dokumen perencanaan strategis-taktis kota, telah menetapkan target kinerja untuk setiap tahunnya sebagaimana lampiran Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Depok tahun 2002-2006 yang didalamnya tercantum indikator target kinerja sebagai acuan target minimal pencapaian kinerja tahunan Kota Depok.

Di dalam Renstra telah ditetapkan 23 program strategis dengan 37 target indikator kinerja. Adapun realisasi pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2005 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel II-1. Pencapaian Kinerja Renstra Kota Depok Tahun 2005

NO	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2005	
				TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Tersalurkannya bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan	Tempat Ibadah	50	159
		Terbinanya kader penyuluh keagamaan	Orang	60	60
2	Pembangunan, Perbaikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Berkurangnya Titik Rawan Kemacetan	Titik	2	3
		Terlayannya PJU	Titik	200	217
3	Pembangunan, Perbaikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Berkurangnya Lokasi Banjir	Lokasi	1	2
		Pemenuhan Kebutuhan Pemakaian Air Irigasi	Daerah Irigasi	1	2
4	Peningkatan Pendidikan Dasar dan Menengah	Terlaksananya rehabilitasi/pembangunan gedung sekolah	Unit	120	135
		Jumlah Guru & Tenaga Kependidikan yang Dilatih	Orang	100	636
		Meningkatnya Wajar Dikdas	%	93	98
5	Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah Masyarakat yang Melek Huruf	Orang	400	780

NO	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2005	
				TARGET	REALISASI
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Tertatanya Kawasan Kumuh	Kawasan	3	6
		Berkurangnya Lokasi Banjir di Lingkungan Permukiman	Lokasi	5	5
		Terangkutnya sampah	%	44	45
		Layanan Prasarana Air Bersih	%	16,4	17,13
7	Pengembangan Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya Penataan Pasar	Pasar Tradisional	1	2
8	Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	Terlatihnya Pengelola Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi	Orang	60	120
9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya AHH	Tahun	67	72,17
10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	Orang	60	60
		Terbinanya Hubungan Industrial antara Pengusaha dan Pekerja	Perusahaan	30	30
11	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terbinanya Kelembagaan Swadaya Masyarakat	Orang	120	120
12	Peningkatan Kesejahteraan sosial	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	5	6,8
13	Peningkatan Prestasi Olah Raga	Terbinanya Atlet yang Berprestasi	Atlet	30	200
		Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga	Kegiatan	4	4
14	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota	Jumlah Aparatur Pemerintah Kota yang mengikuti Diklat	Orang	150	504
		Meningkatnya Penerimaan PAD	%	5	22,79
		Meningkatnya Kapasitas Perencanaan	Dokumen Perencanaan	5	14
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	% Tindak Lanjut	35	85
15	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Berkurangnya Ketidak puasan Masyarakat	Pengaduan	160	72
		Jumlah Penyelesaian Masalah Pertanahan	Masalah	12	12
16	Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Meningkatnya Tindakan Penegakan Perda	%	10	15

NO	PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2005	
				TARGET	REALISASI
17	Peningkatan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	66	80
18	Pengembangan Pertanian Perkotaan	Berkembangnya Komoditi Unggulan	Jenis	1	1
19	Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah	Terlatihnya Pengusaha Industri Rumah tangga, Kecil dan Menengah	Orang	60	70
20	Penataan dan Pengembangan Tata Ruang Kota	Tersusunnya Rencana Tata Ruang BWK	Kawasan	2	2
21	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurunnya Jumlah SITU yang tercemar	SITU	1	1
22	Penataan dan Pengembangan Pariwisata	Terpetakannya Potensi Wisata	Lokasi	1	2
23	Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,04	6,44

Sumber : LKPJ Kota Depok tahun 2005

Dari Tabel II-1 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja tahun 2005 dengan menggunakan tolak ukur Renstra tahun 2002-2006 pada umumnya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan pada beberapa program strategis menunjukkan pencapaian melebihi target yang masing-masing pelaksanaan kegiatannya akan dibahas sebagai berikut :

2.1. Kinerja Kelompok Program Strategis di Bidang Pendidikan

Pencapaian target Renstra Kota Depok tahun 2005 pada Program Pendidikan Dasar dan Menengah telah melampaui target yang telah ditetapkan Renstra, yaitu : melaksanakan rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah sebanyak 135 unit dari target 120 unit sekolah, serta melaksanakan pelatihan terhadap 636 tenaga kependidikan dan guru dari 100 orang yang ditargetkan, serta penuntasan program "Wajar Dikdas" sebesar 98 % dari 93 % yang ditargetkan. Untuk program pendidikan luar sekolah mencapai target jumlah masyarakat yang melek huruf 780 orang baru dari target 400 orang.

Walaupun secara umum target Renstra bidang pendidikan telah dapat dipenuhi, namun secara kualitas masih dirasakan rendah dalam memenuhi kompetensi peserta didik, hal ini antara lain disebabkan keterbatasan pendidik baik secara kualitas dan kuantitas, fasilitas belajar yang masih terbatas serta biaya operasional proses belajar mengajar yang belum seluruhnya dapat dipenuhi pemerintah.

2.2. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Kesehatan

Kinerja kelompok program strategis bidang kesehatan melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan menunjukkan naiknya Angka Harapan Hidup (AHH) setiap tahunnya, dan berdasarkan target AHH tahun 2005 sebesar 67 tahun dapat dicapai menjadi 72,17 tahun, berarti mengalami peningkatan dari pencapaian tahun 2004 dengan nilai 71,96 tahun, artinya kualitas hidup masyarakat terus meningkat dengan semakin baiknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya jaringan pelayanan kesehatan pemerintah melalui Puskesmas sebanyak 27 buah di 6 Kecamatan, 7 puskesmas pembantu dan 838 posyandu. Disamping itu peran pihak swasta terhadap pelayanan kesehatan juga cukup besar. Saat ini Pemerintah Kota Depok tengah mempersiapkan pembangunan RSUD sebagai rujukan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Depok.

2.3. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Ekonomi.

Di Bidang Ekonomi, program-program strategis seperti Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah telah melaksanakan pelatihan terhadap para pengusaha dalam kelompok ini sebanyak 70 pengusaha dari target 40 pengusaha. Penataan Pasar Tradisional terus diupayakan dan dapat direalisasikan sebanyak 2 unit pasar dari 1 unit yang direncanakan. Kemudian, Program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi telah dapat melatih 120 orang dari 60

orang yang ditargetkan, khususnya dalam materi pengelolaan usaha kecil, menengah dan koperasi. Begitu pula dengan Program Perluasan Kesempatan Kerja telah melaksanakan berbagai pelatihan serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang berada di Kota Depok. Untuk Program Peningkatan Investasi di Kota Depok selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini telah memberikan gambaran meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang cukup signifikan, angka statistik menunjukkan LPE Kota Depok tahun perhitungan terakhir tahun 2005 sebesar 6,93 % .

Di Bidang Pertanian, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat, upaya-upaya yang perlu terus didorong adalah dalam program pengembangan pertanian perkotaan, khususnya pengembangan komoditi unggulan, dimana pada tahun 2005 dapat direalisasikan 1 jenis komoditi unggulan sesuai target yaitu anggrek. Untuk itu upaya pengembangan komoditi unggulan diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi Kota Depok.

2.4. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Sosial Budaya

Di Bidang Sosial Budaya, Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial telah menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2005 dari target penurunan 5 % dapat diturunkan sebesar 6,8%.

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama telah tersalurkan bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan kepada 159 tempat peribadatan dari 50 tempat peribadatan yang ditargetkan. Demikian pula halnya dengan pembinaan kader penyuluh keagamaan, pada kurun waktu tersebut telah dilaksanakan penyuluhan pada 60 kader sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya dalam penegakan Perda telah tercapai kondisi yang makin membaik. Kemudian dalam upaya peningkatan prestasi olah raga melalui Program Peningkatan Prestasi Olah raga, telah dilaksanakan pembinaan kepada 200 atlet berprestasi dari target sebanyak 30 orang atlet. Adapun jumlah penyelenggaraan kompetisi olah raga telah terselenggara sesuai dengan target, yaitu 4 kegiatan.

2.5. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Pemerintahan memerlukan kapasitas yang memadai, baik dari sisi kapasitas aparatur, kemampuan keuangan daerah serta perbaikan mekanisme birokrasi guna mencapai tata pemerintahan yang baik. Untuk hal tersebut, Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota mendapat perhatian khusus dalam Renstra Kota Depok. Pada tahun 2005 sejumlah 504 aparatur kota telah mengikuti diklat di berbagai jenjang dan bidang yang diperlukan dari 150 orang yang ditargetkan.

Di sisi Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2005 target kenaikan PAD Kota Depok sebesar 5% dari tahun sebelumnya, namun mampu merealisasikan kenaikan sebesar 22,04%, yang jauh lebih besar dari target yang ditetapkan. Sedangkan dari sisi kualitas pengawasan, dari 35% target rencana tindak lanjut dapat direalisasikan 85% tindak lanjut. Hal ini menunjukkan akan semakin membaiknya kualitas pembangunan sejalan dengan meningkatnya penerimaan daerah dan berjalannya mekanisme pengawasan.

2.6. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Lingkungan

Program-program strategis lainnya yang mendapat perhatian khusus dalam Renstra Kota Depok adalah program-program pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok sebagai payung aktivitas pembangunan dalam penataan dan pemanfaatan ruang kota dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Bagian Wilayah Kota (BWK). Pada tahun 2005 dapat direalisasikan 2 RTR BWK dari target 2 kawasan. Dan untuk menjawab tantangan yang makin berkembang dalam pemanfaatan ruang kota, pada tahun 2005 Pemerintah Kota melaksanakan evaluasi dan revisi RTRW Kota Depok tahun 2000-2010.

Di Bidang Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Depok selalu berupaya mengedepankan wawasan lingkungan dalam setiap gerak pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, selaras dengan visi kota yang mengamanatkan hal tersebut. Program strategis dalam Renstra terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya yang berhubungan dengan upaya penurunan jumlah situ yang tercemar telah dapat direalisasikan 1 situ yaitu situ Tipar sesuai target. Namun hal tersebut belumlah mencukupi. Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah Kota bersama Pemerintah Pusat dan Bank Dunia sedang mempersiapkan suatu program pengelolaan lingkungan perkotaan secara menyeluruh untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, diantaranya adalah pengelolaan persampahan, drainase kota serta normalisasi situ-situ yang jumlahnya cukup signifikan bagi perbaikan tata air di wilayah Jabodetabek.

2.7. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Pelayanan Publik

Di bidang pelayanan publik, Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperbaiki mekanisme pelayanan publik, untuk memenuhi target

Renstra tahun 2005 yaitu berkurangnya ketidakpuasan masyarakat. Pada tahun 2005 baru dapat diselesaikan 72 pengaduan pelayanan publik dari target 160 pengaduan. Dan pada layanan masalah pertanahan yang sangat kompleks telah sesuai dengan target, yaitu 12 masalah telah dapat diselesaikan. Dalam hal ini Pemerintah daerah bersama instansi vertikal senantiasa berupaya menyelesaikan permasalahan pertanahan yang muncul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.8. Kinerja Kelompok Program Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat

Di bidang Kesejahteraan Rakyat, berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Depok menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,85 (tahun 2005) di atas rata-rata IPM Jawa Barat 68,36 dengan indikator penunjangnya, yaitu : Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 72,17 tahun; Rata-rata Lama Sekolah mencapai 10,18 tahun; Daya Beli (*Purchasing power parity*) sebesar 579,30 dan Angka Melek Huruf sebesar 97,16 %. Bahkan menurut catatan BPS Pusat, bahwa pencapaian IPM Kota Depok ini menempati posisi ketiga pada tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

Indikator lainnya yang menunjukkan hasil positif adalah menurunnya Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) pada tahun 2005 yang ditangani oleh Dokter, Bidan dan Tenaga Medis lainnya 93,02% sisanya 6,98% ditangani dukun dan lain-lain. Angka Kematian Bayi pada Tahun 2004 sebanyak 33,38 per 1.000 kelahiran menurun menjadi 33,34 per 1.000 kelahiran di Tahun 2005 dan Angka Kesakitan akibat DBD 2,8 %, sakit Diare 2,6 %, sakit ISPA 0,071 %, sakit TB Paru 64 % dan Filariasis 8 kasus klinik. Gini rasio yang menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan dari 40 % masyarakat yang berpenghasilan rendah, memperlihatkan angka pendapatan masyarakat relatif merata,

atau tidak terjadi ketimpangan, yaitu dengan angka 0,3141 di tahun 2004.

Untuk indikator Pola Konsumsi, relatif tidak berubah yaitu konsumsi makanan masih lebih tinggi dibanding konsumsi non-makanan. Menurut teori, tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non-makanan melebihi 60%. Capaian Indikator Pola Konsumsi masyarakat Depok untuk golongan non-makanan mencapai 45,13 % pada tahun 2002, meningkat menjadi 57,73 % pada tahun 2005 yang sudah mendekati angka 60%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan semakin membaiknya pemulihan/pertumbuhan ekonomi Kota Depok. Namun demikian pengeluaran masyarakat rata-rata per bulan baru mencapai Rp. 366.292,- pada tahun 2004 dan meningkat menjadi Rp. 450.020,- pada tahun 2005.

Hal yang masih memprihatinkan adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang belum mampu diturunkan. Mengingat kompleksnya persoalan ini bukan hanya pada peran pemerintah, tetapi juga peran swasta perlu digalakkan untuk bersama pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran ini. Adapun rincian pencapaian Indikator Kesejahteraan Rakyat dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel II-2. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok Tahun 2005

No.	Indikator	Satuan	Tahun		Keterangan
			2004	2005	
1.	IPM		76,13	76,85	Peringkat ketiga nasional dan tertinggi di Jawa Barat
	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,96	72,17	
	Angka Melek Huruf	%	96,90	97,16	
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,8	10,18	
	Daya Beli	PPP (Rp.000)	575,85	579,30	

No.	Indikator	Satuan	Tahun		Keterangan
			2004	2004	
2	KEPENDUDUKAN				
	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.369.522	1.415.505*	Angka sementara
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,44	3,36	
	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km	6.342	7.046	
3	KESEHATAN				
	AKB (Angka Kematian Bayi)	per 1000 kelahiran hidup	33,38	33,34	CFR (<i>Case Fatality Rate</i>)
	AKI (Angka Kematian Ibu)	Jumlah kematian ibu	13	8	
	Angka Kesakitan - DBD	% thdp jmlh persalinan	0,04	0,05	
	- Diare	%	0,9	2,8	
	- ISPA	%	1,8	2,6	
	- TB Paru	%	0,051	0,071	
	- Filariasis	%	47,47	64	
		kasus klinis	4	8	
4	KETENAGAKERJAAN				
	Angkatan Kerja	Jiwa	545.735	555.751	
	- Bekerja	Jiwa	459.532	487.327	
	- Mencari Pekerjaan	Jiwa	86.203	68.424	
	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	532.668	533.825	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	15,79	12,31	

No	Indikator	Satuan	Tahun		Keterangan
			2004	2005	
5	EKONOMI				
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,35	6,44	
	PDRB atas dasar harga konstan	Rp. (juta)	1.552.624,70	1.652.646,13	
	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku	Rp. (juta)	5.554.257,99	6.358.730,58	
	Gini Ratio		0,281	0,3141	- Relatif merata
6	POLA KONSUMSI				
	Rata-rata Pengeluaran Bulanan/kapita	Rp.	366.292	450.020	
	Pengeluaran Untuk Golongan Makanan	%	44,24	42,27	
	Pengeluaran Untuk Golongan Bukan Makanan	%	55,76	57,73	
7	KEMISKINAN				
	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	65.000	64.000	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Rp. 162.352,-.
	Persentase Penduduk Miskin	%	4,96	4,84	

Sumber : - Laporan Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2005
- Kota Depok Dalam Angka 2005

BAB III

RANCANGAN KERANGKA PEMBANGUNAN

3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH.

Letak geografis Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara, membawa dampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah. Disamping dampak positif tersebut juga berdampak terhadap tantangan pemenuhan tuntutan pembangunan. Posisi Kota Depok yang strategis ini juga mempunyai konsekuensi terhadap timbulnya permasalahan yang patut ditangani secara bijaksana, dimana Kota Depok berperan pula sebagai kota transit akibat tingginya mobilitas penduduk Kota Depok dan sekitarnya menuju Kota Jakarta dan sebaliknya. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari posisi seperti ini antara lain Kota Depok memperoleh kesempatan yang lebih besar dalam menjual potensi yang dimiliki terutama di sektor perdagangan dan jasa guna melayani kebutuhan perekonomian masyarakat setempat.

Secara umum Kota Depok memiliki struktur perekonomian yang stabil selama lima tahun terakhir dan sejak tahun 2002 tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata (Laju Pertumbuhan Ekonomi-LPE) di atas 6% setiap tahunnya, lebih tinggi dibandingkan dengan LPE Jawa Barat yang hanya sebesar 5% setiap tahunnya. Sementara itu dari komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok selama lima tahun terakhir terlihat bahwa semua sektor lapangan usaha yang ada di Kota Depok juga memiliki potensi sangat baik dengan pola tingkat pertumbuhan yang merata di semua sektor. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Depok tahun 2005 diberikan oleh Sektor Sekunder dan Sektor Tersier, masing-masing sebesar 49,09% dan 47,69% dari total

PDRB Tahun 2005 sebesar Rp 1.652,65 milyar, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Depok sebesar 6,44%.

Tabel III-1. Distribusi Persentase PDRB Kota Depok (ADHK)

No	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004
PRIMER		3,32	3,21	3,12	3,00	2,91
1	PERTANIAN	3,32	3,21	3,12	3,00	2,91
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-	-
SEKUNDER		50,85	51,06	51,33	51,58	51,81
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	39,86	40,03	40,45	40,78	41,09
4	LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM	3,97	4,02	4,01	3,98	3,96
5	BANGUNAN/KONSTRUKSI	7,02	7,01	6,87	6,82	6,77
TERSIER		45,83	5,73	45,55	5,42	5,28
6	PERDAG, HOTEL & RESTORAN	25,49	25,32	25,23	25,12	24,99
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,99	6,03	6,12	6,15	6,18
8	BANK & LEMB. KEUANGAN LAINNYA	4,81	4,82	4,79	4,87	4,95
9	JASA-JASA	9,54	9,56	9,41	9,28	9,15
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
LPE KOTA DEPOK		4,47	5,98	6,12	6,35	6,44

Pada tahun 2006, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok ditargetkan pada angka pertumbuhan 6,54%. Dengan demikian PDRB Kota Depok atas dasar harga konstan pada tahun 2006 diperkirakan akan mencapai Rp. 1.855,29 milyar, sementara inflasi tahun 2006 diperkirakan akan berada pada 7 %, dan diharapkan tingkat

pengangguran berada di bawah 7,28 % dengan perkiraan jumlah penduduk mencapai 1.406.523 jiwa.

Perekonomian Kota Depok pada tahun 2007 diperkirakan kondisinya tidak akan berbeda jauh dari tahun sebelumnya, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2007 diperkirakan akan berada pada kisaran 6,18 %. Berdasarkan perkiraan tersebut maka PDRB Kota Depok tahun 2007 akan mencapai Rp. 1.886,62 milyar (berdasarkan harga konstan 1993) dengan asumsi sektor ekonomi memberikan kontribusi terbesar, terutama dari sektor industri pengolahan. Sedangkan tingkat inflasi tahun 2007 diperkirakan 8,78% (di atas inflasi Propinsi Jawa Barat yang diprediksikan pada tingkat 8%), diharapkan tingkat pengangguran berada dibawah 697.512 orang dari jumlah penduduk tahun 2007 yang diperkirakan mencapai 1.441.903 jiwa.

3.2. ISU STRATEGIS KOTA DEPOK

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kota Depok tahun 2005, menunjukkan peningkatan di berbagai aspek pembangunan, tetapi juga masih terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Disamping permasalahan yang belum terselesaikan pada tahun 2006, terdapat pula beberapa program kampanye walikota dan wakil walikota terpilih yang harus direalisasikan pada tahun 2007 dengan tetap memperhatikan kesinambungan program pembangunan sebelumnya.

Sebagai kota yang berdampingan dengan DKI Jakarta, Kota Depok senantiasa dipengaruhi oleh berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut, langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi kondisi internal Kota Depok. Kompleksitas permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi pada lingkungan eksternal kota, ditambah dengan berbagai kondisi dan permasalahan internal kota. Perpaduan kedua permasalahan dan kondisi dari kedua lingkungan strategis ini, menjadi satu kesatuan isu strategis yang dinamis.

Berdasarkan evaluasi permasalahan tersebut, dan dimunculkan beberapa isu strategis dalam pembangunan Kota Depok tahun 2007, antara lain :

3.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi seluruh kota besar di tanah air, dan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. Kondisi kemiskinan di Kota Depok sangat dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu rendahnya daya beli masyarakat dan kurangnya kemandirian dan kemampuan memperoleh akses untuk hidup yang layak.

Daya beli masyarakat ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uang secara rata-rata selama satu bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Daya beli masyarakat juga diukur dengan tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik untuk konsumsi makanan dan bukan makanan. Komposisi keduanya menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat apabila pengeluaran masyarakat untuk bukan makanan melebihi 60% dari total pengeluaran, sehingga pola pengeluaran masyarakat dapat mencerminkan besar kecilnya daya beli masyarakat.

Hasil Susenas selama periode tahun 2003 sampai 2005 menunjukkan bahwa pola pengeluaran masyarakat Kota Depok semakin membaik, dimana persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan menunjukkan pola kecenderungan yang semakin menurun, sedangkan untuk bukan makanan semakin meningkat. Meskipun demikian persentase tingkat pengeluaran masyarakat Kota Depok untuk konsumsi bukan makanan masih di bawah standar kesejahteraan. Selain itu Gini

Rasio di Kota Depok menunjukkan kecenderungan yang semakin tidak merata.

Tabel III- 2. Tingkat Pengeluaran/Kapita/Bulan di Kota Depok

Golongan Pengeluaran	2003	2004	2005
Makanan	Rp 181.259 (54,87 %)	Rp 162.056 (44,24 %)	Rp 190.211 (42,27 %)
Bukan Makanan	Rp 149.073 (45,13 %)	Rp 204.236 (55, 76 %)	Rp 259.809 (57,73 %)
Total	Rp 330.332	Rp 366.292	Rp 450.020
Gini Rasio	0,121 %	0,281 %	0,314 %

Sumber ; BPS Kota Depok

Jumlah penduduk miskin di Kota Depok pada tahun 2005 sebesar 4,84% dari total penduduk, dan memperlihatkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Jawa Barat yang mencapai 12,90%, tetapi angka tersebut mengalami pertumbuhan 1,73% selama periode 2000-2003 dan mengalami puncaknya pada tahun 2002, seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel III-3. Angka Kemiskinan Kota Depok

Uraian	2002	2003	2004	2005
Jumlah Penduduk	910,003	1,204,687	1,313,836	1.369.461

Jumlah Penduduk Miskin	37.300	68.500	65.000	64.000
% Penduduk Miskin	3,23	5,62	4,96	4,84

Sumber : BPS Kota Depok

Pertumbuhan angka kemiskinan di Kota Depok antara lain disebabkan adanya pertumbuhan permukiman liar (*squatter*) di Kota Depok. Tercatat sebanyak 13 lokasi utama permukiman liar, seperti di kawasan Situ Rawa Besar, Bantaran Kali Cabang Tengah dan Timur, Bantaran rel Dewi Sartika, Bantaran Kali Baru, TPA Cipayung, Bantaran Kali Angke Lima, Areal RRI, Bantaran Situ Tipar dan beberapa lokasi lainnya. Disamping itu kemiskinan juga disebabkan oleh adanya migrasi penduduk dari luar Kota Depok.

3.2.2 Persampahan

Sampah merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh hampir seluruh kota di Indonesia, dan produksinya terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan kota tersebut. Produksi sampah yang meningkat merupakan konsekuensi berkembangnya sebuah kota.

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan sampah Kota Depok, sejauh ini belum berhasil menyelesaikan masalah persampahan secara tuntas, walaupun setiap tahunnya dilakukan intervensi penanganannya, hal ini sebagai akibat semakin kompleksnya masalah persampahan. Pada beberapa lokasi kondisinya semakin memburuk, akibatnya volume sampah yang tertangani tidak mampu mengimbangi produksi sampah yang setiap harinya mencapai rata-rata 766 m³, atau setara dengan 2,65 liter/orang/hari, dengan tingkat pertumbuhan setiap harinya mencapai 4,4 %.

Dari keseluruhan timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Depok setiap harinya, terbesar merupakan sampah makanan sebanyak 61,08 %,

dikuti dengan sampah plastik 13,0 % dan terkecil adalah sampah logam sebanyak 0,41%. Dari karakteristik sampah tersebut dapat dikatakan bahwa timbulan sampah di Kota Depok merupakan dampak dari pesatnya pertumbuhan tingkat hunian masyarakat yang diiringi pula dengan peningkatan kawasan perekonomian seperti pusat perbelanjaan dan perkantoran.

Tabel III-4. Kondisi Persampahan di Kota Depok

Sumber Produksi		Volume
Timbulan Sampah	• Domestik	475 m ³ per hari
	• Komersial	107 m ³ per hari
	• Pasar	161 m ³ per hari
	• Industri & Rumah Sakit	23 m ³ per hari
	TOTAL	766 m ³ per hari
Tingkat Pertumbuhan		4,4 %
Volume dikumpulkan	• Domestik	309 m ³ per hari
	• Komersial	68 m ³ per hari
	• Pasar	94 m ³ per hari
	• Industri & Rumah Sakit	17 m ³ per hari
	TOTAL	488 m ³ per hari

Sumber : DKLH Kota Depok, 2005

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hampir separuh produksi sampah tidak tertangani dan terus menumpuk seiring dengan tingkat pertumbuhannya. Peningkatan produksi sampah ini tidak sebanding dengan kemampuan dan fasilitas pengelolaan sampah yang ada. Saat ini

Kota Depok hanya memiliki satu unit Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang berlokasi di Cipayung, yang didukung 3 depo dan 113 unit Tempat Penampungan Sementara (TPS), sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-5. Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kota Depok

Fasilitas	Lokasi	Luas Total	Luas Pakai	Akhir Guna
TPA Cipyung	Kec. Pancoran Mas	10,1 ha	5 ha	2010
Depo Jl. Sadewa	Kec. Sukmajaya	200 m ²	200 m ²	
Depo Jl. Mawar	Kec. Pancoran Mas	126,25 m ²	126,25 m ²	
Depo Jl. Jawa	Kec. Beji	264 m ²	264 m ²	
TPS	113 unit	Bervarias i		

Sumber : DKLH & Survei 2005

Dengan mempertimbangkan produksi sampah yang terus meningkat, diperkirakan kebutuhan lahan TPA pada tahun 2010 adalah seluas 29 Ha, untuk itu pilihan sistem pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu (Sipesat) dengan mereduksi sampah dan menyelesaikannya di sumbernya dengan skala kawasan merupakan

alternatif pilihan yang sedang diuji cobakan untuk dapat dikembangkan pada tahun 2007, sehingga dapat mengurangi beban TPA.

3.2.3 Kemacetan

Tata ruang Jabotabek (sekarang Jabodetabek) yang diintrodusir sejak tahun 1970-an, menempatkan kawasan Depok sebagai salah sebuah pusat pertumbuhan intra-regional dan salah satu Pusat Pertumbuhan Penyanga Ibukota, seperti halnya Tangerang, Bogor dan Bekasi. Hal ini diperkuat dengan Keppres No. 114 tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopunjur yang menetapkan Kecamatan Cimanggis, Sawangan dan Limo sebagai kawasan resapan air Jabodetabek sehingga ketiga kecamatan masuk dalam Konsep Pengembangan Intensitas Sedang Rendah.

Dalam perkembangannya, pertumbuhan penduduk meningkat hampir di semua kecamatan se-Kota Depok. Dalam RTRW tahun 2000-2010, diprediksikan penduduk Kota Depok tahun 2004 sebanyak 1.329.205 jiwa, namun kenyataannya mencapai 1.369.461 jiwa, atau melebihi 3% dari perencanaan semula. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan yang kian meningkat baik untuk perumahan maupun untuk infrastruktur kehidupan lainnya, seperti pusat perekonomian dan transportasi. Kondisi ini diperburuk dengan pertumbuhan yang kurang merata yang mana pengembangan kota terpusat di wilayah bekas Kotif Depok, kawasan Cinere dan Cibubur. Disamping itu faktor ketidaktertiban angkutan umum, pedagang kaki lima juga berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas.

Akumulasi dari keadaan tersebut membawa dampak terhadap mobilitas penduduk yang bersinergi dengan mobilitas kepadatan arus lalu lintas. Kemacetan yang terjadi di Kota Depok terutama terjadi hampir pada semua ruas jalan yang ada, terutama pada jam-jam sibuk (*peak*

hours) di pagi dan sore hari, ruas jalan yang ada baru mencapai 484,872 km yang terbagi dalam 308 ruas jalan, hal ini tidak dapat menampung peningkatan angkutan jalan.

Beberapa titik kemacetan yang disurvei paling berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas mencapai 10 titik yang perlu diintervensi. Dengan mempertimbangkan kemampuan APBD maka untuk tahun 2007 ditargetkan dapat mengatasi minimal 2 titik kemacetan, baik melalui peningkatan jalan, pelebaran jalan, pembuatan fly over maupun jaringan jalan baru.

3.2.4 Banjir.

Titik banjir di Kota Depok umumnya terjadi sebagai akibat dari semakin mengecilnya permukaan tanah yang terbuka bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah permukaan yang tertutup, sehingga menimbulkan genangan air pada beberapa bagian kota. Demikian pula dengan menurunnya daya serap sungai dan situ yang ada sebagai dampak semakin mengecil dan dangkalnya sejumlah sungai dan situ yang ada di Kota Depok.

Akumulasi permasalahan tersebut mengakibatkan seringnya terjadi luapan air sungai dan genangan pada bagian tertentu wilayah Kota, sehingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas apabila curah hujan cukup tinggi. Untuk itu target tahun 2007 untuk penanganan masalah banjir ini tidak saja dilakukan melalui pembuatan sodetan genangan ke sungai tetapi akan diintervensi pula melalui program lainnya seperti pengerukan dan pengelolaan situ-situ sebagai sumber resapan pada tahun-tahun berikutnya. Untuk mengukur target kinerja titik banjir maka ditargetkan setiap tahunnya minimal dapat mengatasi 1 titik banjir.

3.2.5 Kinerja Pemerintah Daerah

Kondisi pemerintah Kota Depok saat ini semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan. Hal ini terkait dengan kepuasan pelanggan baik dalam hal pengurusan perizinan maupun pemenuhan fasilitas publik. Untuk itu pembentukan sistem pelayanan terpadu maupun perluasan jangkauan pelayanan merupakan suatu tuntutan kebutuhan masyarakat yang perlu diimplementasikan secara bertahap.

Hal ini sejalan pula dengan visi dan misi Walikota terpilih yang mengutamakan pada pelayanan masyarakat. Diprediksikan di masa depan tuntutan terhadap kinerja pemerintah akan semakin tinggi. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan tersebut maka diperlukan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintah daerah baik melalui penataan kelembagaan, pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas peran dan fungsi legislatif. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi pula aspek pengawasan, perencanaan dan penegakan hukum.

3.2.6 Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Meskipun IPM Kota Depok pada bidang pendidikan menunjukkan angka yang relatif baik, yaitu : 97,16% pada Angka Melek Huruf (AMH) dan 10,18 tahun pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS), namun bidang pendidikan ini masih menghadapi permasalahan, diantaranya : jumlah guru, kualifikasi guru dan kurikulum.

Guru pada tingkat SD berjumlah 4.219 guru dengan tingkat kualifikasi guru dengan kategori layak sebanyak 80,61%; semi layak 4,55% dan guru tidak layak 2,99 %. Selanjutnya 100 % guru SD yang telah diuji menunjukkan telah sesuai antara bidang yang diajarkan dengan latar belakang pendidikannya. Pada tingkat SMP secara

keseluruhan memiliki 2.681 guru dengan tingkat kualifikasi guru yang layak 76,50 %; semi layak 11,82 % dan guru yang tidak layak 11,68 %. Sedangkan hasil pengujian 100 % guru SMP telah sesuai antara bidang yang diajarkan dengan jurusan ijasahnya. Pada tingkat pendidikan menengah atas (SMU/SMK) jumlah guru secara keseluruhan di Kota Depok adalah 1.207 guru dengan kesesuaian antara bidang mengajar dengan latar belakang pendidikan rata-rata sebagai berikut : Bidang PPKN 129,85 %; Pendidikan Agama 101,03 %; Bahasa Indonesia 117,89 %; Bahasa Inggris 97,09 %; Sejarah / Budaya 103,61 %; Pendidikan Jasmani 93,85 %; Matematika 91,49 %; Fisika 93,67 %; Biologi 96,20 %; Kimia 83,33 %; Ekonomi 106,02 %; Sosiaologi 90,57 %; Geografi 90,57 %; Tata Negara 100 %; Antropologi 84,85 %; Pendidikan Seni 87,18 %; Bahasa Asing 152,94 % dan BP 100 %. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa di Kota Depok ditemui sebagian kecil ketidaksesuaian bidang yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru. Prosentase tingkat kelayakan mengajar guru SMA di Kota Depok yaitu guru yang layak mengajar sekitar 62,55 %; semi layak 25,43 % dan tidak layak 12,01 %.

Institusi pendidikan yang ada di Kota Depok belum efektif dalam menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal ini sangat disayangkan karena KBK merupakan kurikulum yang mempersiapkan generasi muda termasuk peserta didik agar memiliki kompetensi multidimensional. Kompetensi yang dapat dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman guru mengenai konsep dan cara penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hal ini berdampak pada sulitnya

menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya serta minimnya skill peserta didik.

Kondisi ruang kelas di Kota Depok secara umum dari tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah atas rata-rata baik. Pada tingkat SD kondisi ruang kelas yang baik sebanyak 1.444 sekolah (64,81%). Dari 6 kecamatan yang ada, kondisi ruang kelas yang mengalami rusak berat di tingkat Sekolah Dasar (SD) paling banyak terdapat di Kecamatan Sukmajaya, yaitu 122 sekolah (20,07%) dan Kecamatan Sawangan yaitu 61 sekolah (18,71%). Pada tingkat SMP kondisi ruang kelas yang baik sejumlah 882 sekolah (85,96%). Kecamatan yang memiliki ruang kelas rusak berat pada tingkat SMP paling banyak terdapat pada Kecamatan Pancoran Mas dengan jumlah 18 sekolah (5,33%). Pada tingkat pendidikan menengah (SMU) kondisi ruang kelas yang baik sebanyak 386 sekolah dan kondisi ruang kelas yang rusak berat paling banyak terdapat di Kecamatan Sukmajaya dan Limo, yaitu sebanyak 1 sekolah.

Biaya pendidikan yang relatif mahal juga menjadi permasalahan yang dihadapi para orang tua murid. Untuk mengatasi tingginya biaya pendidikan di Kota Depok, pemerintah Kota Depok pada tahun 2006 memberikan subsidi operasional Sekolah Dasar (SD gratis) senilai Rp. 6.828.052.050,00 serta bantuan fisik dan nonfisik untuk Sekolah Dasar senilai Rp. 7.012.137.000,00 sedangkan Sekolah Menengah mendapat bantuan dana untuk fisik dan nonfisik senilai Rp. 13.395.300.000,00 yang berasal dari Pemerintah pusat, yayasan, orang tua, dan pemerintah daerah lainnya.

Faktor lain yang menjadi masalah adalah rendahnya motivasi belajar masyarakat dan kurangnya kesadaran akan pendidikan seumur hidup, dengan anggapan bahwa jika mereka sudah tua, mereka tidak lagi memerlukan pendidikan. Data layanan pendidikan ada tetapi

kurang akurat untuk merefleksikan bahwa sasaran beserta kondisi-kondisi yang mempengaruhinya sesuai realitas yang ada.

3.2.7 Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan

Meskipun Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok cukup tinggi (72,17 tahun) dan IMR cukup rendah (33,34/1000 KLH) namun masih menghadapi berbagai permasalahan. Nilai IMR 33,34 ini tergolong "Intermediate Rock", intervensi untuk penurunannya lebih difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: (a) Mempertahankan IMR yang sudah rendah sambil terus berusaha menurunkannya; (b) Mempertahankan AHH yang sudah tinggi sambil terus meningkatkannya melalui upaya kesehatan secara umum; serta (c) Menunjang kinerja peningkatan indeks daya beli dengan cara:

- Menurunkan beban biaya kesehatan bagi individual, keluarga dan pemerintah daerah akibat penyakit yang diderita penduduk melalui intensitas program pencegahan dan pengendalian yang berfokus pada faktor risiko penyakit dan berbasis peran serta masyarakat.
- Melengkapi sarana dan meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi penduduk golongan sosial ekonomi menengah ke bawah, yaitu di Puskesmas maupun RSUD yang sedang dibangun.

Selain itu walaupun IMR telah menurun, masih perlu dilakukan upaya kesehatan ibu dan anak dengan fokus pada penduduk miskin, sehingga penurunan IMR lebih lanjut diharapkan bisa terjadi. Akar masalah kematian bayi pada tingkat tersebut adalah pada perilaku dan pendidikan ibu, serta pertolongan oleh tenaga terlatih. Oleh karena itu, untuk menurunkan IMR dan meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak, upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: fasilitasi & implementasi kemitraan bidan dengan rumah sakit dalam upaya

penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), penanggulangan balita gizi buruk melalui orientasi dan implementasi perilaku positif dan pemberian makanan tambahan pemulihan, serta pemberian vitamin A untuk bayi, balita, ibu nifas, dan pemberian tablet zat besi (Fe) untuk ibu hamil. Termasuk upaya pembentukan kota siaga, kelurahan siaga, revitalisasi posyandu serta pembentukan posyandu unggul/plus.

Dengan AHH yang tinggi, secara demografis jumlah penduduk usia lanjut menjadi besar. Perilaku tidak sehat merupakan akar masalah dalam upaya memperpanjang AHH lebih lanjut. Hal ini termasuk kebiasaan olah raga, menjaga diet yang seimbang, konsumsi rokok dan alkohol. Di lain pihak nilai-nilai indikator kesehatan AKK masih cukup tinggi. Saat ini Kota Depok mengalami beban ganda, dimana PTM di Kota Depok sangat tinggi prevalensinya dan banyak terjadi pada usia produktif juga pada golongan sosial ekonomi menengah ke bawah. Selain penyakit tersebut memberikan beban biaya kesehatan yang sangat mahal dan menurunkan produktivitas, salah satu PTM, yaitu penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu. Adapun usaha penanggulangan PTM antara lain melalui penatalaksanaan program penyakit tidak menular, surveilansi PTM, pembentukan klub jantung sehat, HUT Lembaga Lansia Indonesia, pembinaan posbindu dan kader-kadernya, serta peningkatan kuantitas & kualitas kesehatan lansia. Pencegahan, pengendalian dan pemantauan penyakit menular, serta pencegahan, pengendalian dan pemantauan penyakit tidak menular (PTM) di tiap-tiap kelurahan.

Sementara itu HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba juga meningkat kejadiannya dan epidemi DBD seringkali tidak terprediksi. Demikian pula morbiditas-mortalitas TBC masih sulit diturunkan secara maksimal baik melalui peran serta masyarakat, puskesmas maupun klinik

dan rumah sakit swasta khususnya untuk penduduk dengan golongan sosial ekonomi menengah ke bawah. Padahal penyakit tersebut mempunyai prevalensi yang tinggi. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat efektif dan sangat efisien melalui peran serta masyarakat baik individu, keluarga maupun swasta dengan pembinaan yang intensif dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Oleh karena itu upaya peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular adalah sebagai berikut : intensifikasi Tim Epidemiologi Kota (TEK), evaluasi program Tim Epidemiologi Kota (TEK), indentifikasi penyakit menular, penanggulangan ISPA & Diare, penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular (HIV, TBC, Kusta, ISPA & Diare), penanggulangan DBD dengan penambahan mesin penyemprotan (*fogging*), serta pengobatan Filariasis.

BAB IV ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Anggaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2007 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Depok. Anggaran pembangunan daerah tersebut dari berbagai sumber pendanaan antara lain : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, APBD Propinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

4.1 KERANGKA ANGGARAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pedoman teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa pelaksanaan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi. Oleh sebab itu pelaksanaan APBD harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4.1.1 Kondisi APBD

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sedangkan Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

4.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajak daerah terdiri dari 6 jenis pajak (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU dan parkir). Sedangkan retribusi daerah terdapat 27 jenis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari 2 pos, yaitu bagian laba PDAM dan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah terdapat 5 jenis.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama 4 tahun (2003-2006) dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 17,10 % dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata per tahun adalah berkisar sebesar 11 %. Berikut ini disajikan tabel perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.

Tabel IV-1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

NO	TAHUN	PAD	Pertumbuhan (%)	APBD	Proporsi (%)
1	2003	41.165.629.524,00		393.162.362.119,02	10,47
2	2004	49.916.768.407,91	21,26	470.271.615.877,00	10,61
3	2005	64.060.869.668,97	28,34	534.250.694.945,27	11,99
4	2006	65.149.151.766,85	1,70	595.569.467.747,91	10,94
Rata-rata per Tahun			17,10		11,00

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kota Depok selama 4 tahun terakhir (2003-2006) pertumbuhannya rata-rata per tahun adalah sebesar 16,21% dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama adalah rata-rata sebesar 80,31 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Dana Perimbangan Kota Depok selama 4 tahun :

Tabel IV-2. Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

NO	TAHUN	Dana Perimbangan	Pertumbuhan (%)	APBD	Proporsi (%)
1	2003	315.103.996.476,00		393.162.362.119,02	80,15
2	2004	378.848.440.072,41	20,23	470.271.615.877,00	80,56
3	2005	415.229.467.888,00	9,60	534.250.694.945,27	77,72
4	2006	493.318.004.764,00	18,81	595.569.467.747,91	82,83
Rata-rata per Tahun			16,21		80,31

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar dalam sumber penerimaan APBD Kota Depok, atau dengan kata lain menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota terhadap penerimaan Dana Perimbangan khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU).

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Depok selama 4 tahun terakhir (2003-2006) pertumbuhannya rata-rata per tahun mengalami penurunan -23,40 % dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 2,17 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Depok.

Tabel IV-3. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

NO	TAHUN	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi (%)
1	2003	13.408.374.000,00		393.162.362.119,02	3,41
2	2004	10.411.099.000,00	(22,35)	470.271.615.877,00	2,21
3	2005	13.533.200.000,00	29,99	534.250.694.945,27	2,53
4	2006	3.000.000.000,00	(77,83)	595.569.467.747,91	0,50
Rata-rata per Tahun		10.088.168.250,00	(23,40)	498.313.535.172,30	2,17

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

Total pendapatan Kota Depok yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah dalam kurun waktu 2003-2006 mengalami peningkatan sebesar 14,98% per tahun dan kontribusinya terhadap APBD adalah sebesar 93,48% per tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-4. Perkembangan Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

NO	TAHUN	PENDAPATAN	Pertumbuhan (%)	APBD	Kontribusi (%)
1	2003	369.678.000.000,00		393.162.362.119,02	94,03
2	2004	439.176.307.480,32	18,80	470.271.615.877,00	93,39
3	2005	492.823.537.556,97	12,22	534.250.694.945,27	92,25
4	2006	561.467.156.530,85	13,93	595.569.467.747,91	94,27
Rata-rata per Tahun			14,98		93,48

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

4.1.3. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran, pengalokasian belanja diklasifikasikan menurut kelompok, bagian dan jenis belanja sesuai dengan prioritas rencana selama satu tahun anggaran.

Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-5. Perkembangan Belanja APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

NO	TAHUN	BELANJA	PERTUMBUHAN (%)	APBD	PROPORSI (%)
1	2003	381.142.138.819,02		393.162.362.119,02	96,94
2	2004	463.568.481.368,00	21,63	470.271.615.877,00	98,57
3	2005	527.366.694.945,27	13,76	534.250.694.945,27	98,71
4	2006	581.345.467.747,91	10,24	595.569.467.747,91	97,61
Rata-rata per Tahun		488.355.695.720,05	15,21	498.313.535.172,30	98,00

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok selama kurun waktu 4 tahun (2003-2006) yaitu rata-rata pertumbuhan per tahun belanja SKPD mengalami kenaikan sebesar 15,88%; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 6,63% dan belanja tidak terduga naik sebesar

342,90%. Sedangkan proporsi masing-masing belanja terhadap total belanja rata-rata per tahun belanja SKPD memiliki porsi 90,05%; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan memiliki porsi 8,83% dan belanja tidak terduga memiliki porsi 1,12%, perkembangannya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel IV-6. Perkembangan Rincian Belanja APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				Rata2 Pertum- buhan(%)	Rata2 Propors i (%)
		2003	2004	2005	2006		
	BELANJA	381.142.138.819,02	463.568.481.368,00	527.366.694.945,27	581.345.467.747,91	15,21	
1	Belanja SKPD	345.171.129.396,02	414.028.522.217,00	464.293.194.787,75	536.467.794.748	15,88	90,05
2	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	34.621.009.423,00	48.292.464.200,00	48.154.906.600,00	38.848.423.000	6,63	8,83
3	Belanja Tidak terduga	1.350.000.000,00	1.247.494.951,00	14.918.593.557,52	6.029.250.000	342,90	1,12

4.1.4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perkembangan pembiayaan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 37,31 % per tahun, sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel IV-7. Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

TAHUN	PEMBIAYAAN		SURPLUS (DEFISIT)	PERTUM- BUHAN (%)
	PENERIMAAN	PENGELUARAN		

2003	23.484.362.119,02	12.020.223.300,00	11.464.138.819,02	
2004	31.095.308.396,68	6.703.134.509,00	24.392.173.887,68	112,77
2005	41.427.157.388,30	6.884.000.000,00	34.543.157.388,30	41,62
2006	34.102.311.217,06	14.224.000.000,00	19.878.311.217,06	(42,45)
Rata-rata Pertumbuhan				37,31

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2003-2006

4.2. KEBIJAKAN ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam format pendapatan, belanja, maupun pembiayaan dengan mengacu pada prinsip anggaran sebagaimana terdapat pada Permendagri No.26 tahun 2006 sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat;
2. Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab;
3. Disiplin Anggaran merupakan satu-satunya instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah;
4. Keadilan anggaran atau kewajaran, yang terkait dengan prinsip kewajaran horizontal dan kewajaran vertikal. Prinsip

dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula;

5. Efisiensi dan efektifitas anggaran, yaitu dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
6. Taat azas, yaitu sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah.

4.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah;

- b. Dana Perimbangan, meliputi : dana bagi hasil (yang bersumber dari pajak dan dari sumberdaya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Umum pendapatan daerah tahun 2007 adalah meningkatkan kemampuan penerimaan keuangan daerah dari semua jenis penerimaan terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2007, maka strategi dan prioritas pencapaiannya dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan PAD pada tingkat pencapaian 5 % dibandingkan tahun sebelumnya;
- b. Meningkatkan sumber-sumber pendapatan lainnya melalui :
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
 - Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

4.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja

Anggaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, seperti pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dan penyusunannya berdasarkan standar pelayanan minimal, standar analisis belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja. Untuk itu salah satu upaya pengendalian efisiensi dan efektifitas belanja dilakukan

melalui upaya penetapan secara jelas tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai, dan peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai.

4.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan mengindikasikan akan terjadinya defisit pendapatan, dengan indikasi belanja lebih besar dari pendapatan, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit anggaran ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyusunan anggaran sepanjang selisih kurang tersebut dapat ditutupi melalui pembiayaan. Oleh sebab itu kebijakan pembiayaan akan mengupayakan jumlah pembiayaan sama dengan jumlah defisit anggaran yang ada, dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan, antara lain : Sisa lebih perhitungan anggaran, Dana cadangan, Penjualan aset daerah yang dipisahkan, Pinjaman daerah atau Penerbitan obligasi sehingga dapat diupayakan anggaran yang berimbang.

4.3 ALOKASI ANGGARAN INDIKATIF TAHUN 2007

Memperhatikan perkembangan anggaran untuk membiayai pembangunan daerah, dapat diindikasikan alokasi proporsi anggaran belanja langsung indikatif tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Tabel IV-8. Perkiraan Plafon Indikatif Per Program
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2007

NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TH. 2007 (%)
----	---------	--------------------------------

1	Peningkatan manajemen pelayanan	2,48
2	Peningkatan integrasi pelayanan	0,07
3	Peningkatan jangkauan pelayanan	0,09
4	Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural dan fungsional	1,13
5	Peningkatan peran dan fungsi legislatif	1,20
6	Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	0,04
7	Pengelolaan dan pengembangan aset daerah	5,50
8	Peningkatan kualitas pengawasan	0,05
9	Peningkatan kualitas produk hukum daerah	0,04
10	Pengembangan kearsipan, perpustakaan dan telamatika	0,34
11	Peningkatan kerjasama antar lembaga	0,01
12	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan	4,45
13	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	14,20
14	Pengembangan Manajemen Transportasi	0,15
15	Pengembangan transportasi masal	0,03
NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TH. 2007 (%)
16	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPA	1,17

17	Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan di TPS	1,82
18	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	2,35
19	Pengendalian banjir	4.83
20	Perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang & bangunan	1,00
21	Penataan lingkungan pemukiman	2,23
22	Peningkatan jangkauan layanan air bersih	1,50
23	Peningkatan Produktifitas usaha koperasi dan UKM	0,79
24	Pengembangan dan penataan pasar rakyat	0,33
25	Pengembangan usaha industri rumah tangga, kecil dan menengah	0,03
26	Pengembangan usaha perdagangan dan jasa	0,01
27	Peningkatan daya tarik investasi	0,06
28	Peningkatan kualitas ketenagakerjaan	0,11
29	Perlindungan ketenagakerjaan	0,04
30	Pengembangan Agribisnis Perkotaan	1,15
31	Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan	0,88
NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TH. 2007 (%)
32	Penyiapan kawasan niaga dan industri yang ramah lingkungan	0,00

33	Peningkatan pendapatan daerah	0,42
34	Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah	0,33
35	Peningkatan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	0,03
36	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah	29,82
37	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	1,78
38	Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan	0,01
39	Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya di sekolah	0,23
40	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	5,59
41	Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga	0,32
42	Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi	0,17
43	Penanganan penyakit menular dan tidak menular	0,17
44	Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar	0,16
45	Penyelenggaraan promosi kesehatan	0,38
46	Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera	1,45
NO	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TH. 2007 (%)
47	Penyelenggaraan jaminan sosial	1,15
48		0,20

	Peningkatan tertib sosial	
49	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	0,00
50	Peningkatan kualitas kehidupan politik	0,08
51	Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan	0,34
52	Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan	0,15
53	Penanggulangan bencana	0,04
54	Pengembangan agrowisata dan obyek wisata	0,02
55	Peningkatan pelestarian seni dan budaya	0,15
56	Meningkatkan potensi dan prestasi olahraga	0,00
57	Pelayanan administrasi Perkantoran	5,57
58	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,91
59	Peningkatan disiplin aparatur	0,42
60	Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	0,24
61	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,17
62	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah	0,04
	TOTAL	100

BAB V

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok tahun 2007 merupakan penjabaran dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011 dalam rangka menjawab isu strategis yang muncul serta dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian target indikator makro Kota Depok dengan memperhatikan prioritas pembangunan Propinsi Jawa Barat sebagaimana terdapat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Jawa Barat (RKPD) Propinsi tahun 2007, yaitu 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2007, yaitu :

1. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
2. Peningkatan aksesibilitas serta kualitas kesehatan dan pendidikan
3. Pemantapan kinerja pemerintahan daerah
4. Revitalisasi agribisnis
5. Peningkatan upaya mitigasi bencana alam dan rehabilitasi kualitas lingkungan
6. Perbaikan perilaku masyarakat dan penguatan budaya daerah
7. Perbaikan perilaku dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah
8. Percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan Jawa Barat, isu strategis serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, maka target indikator makro kota tahun 2007 meliputi pencapaian target misi melalui pengukuran indikator makro kota, yang meliputi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 2,5 % , mengurangi titik kemacetan minimal 2 titik, mengurangi titik banjir pada 1 lokasi, bertambahnya cakupan pelayanan sambungan air bersih

1000 SR, bertambahnya unit pengolahan sampah pada 10 lokasi, penataan kawasan kumuh pada 3 lokasi, meningkatnya LPE 6,40 % meningkatnya pendapatan asli daerah, dan meningkatnya indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,60 sebagaimana target indikator makro kota berikut :

Lampiran : Indikator Makro Kota Depok

No.	Misi	Indikator Makro	Satuan	Target
				2007
1.	Mewujudkan Pelayanan yang Ramah, Cepat dan Transparan	Indek Kepuasan masyarakat	%	2,5
2.	Membangun dan Mengelola Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Cukup, Baik, dan Merata	a.Berkurangnya titik kemacetan	titik	2
		b.Berkurangnya titik banjir	lokasi	1
		c.Bertambahnya cakupan layanan air baku	SR	1000
		d.Bertambahnya unit pengolahan sampah	lokasi	10
		e.Tertatanya kawasan kumuh	lokasi	3
3.	Mengembangkan Perekonomian Masyarakat, Dunia Usaha dan Keuangan Daerah	a.Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,40
		b.Meningkatnya PAD	%	5
4.	Meningkatkan Kualitas Keluarga, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdasarkan Nilai-nilai Agama	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		77.60
		a.Meningkatnya Indeks Kesehatan (IK)		72.71

		b.Meningkatnya Indeks Pendidikan (IP)		68.30
		c.Meningkatnya Indeks Daya Beli (IDB)	Rp/Kapita	595.50

Untuk merealisasikan pencapaian target indikator makro kota tahun 2007 tersebut, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan sebagai upaya pemilahan prioritas dan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Untuk itu prioritas pembangunan harus merupakan upaya terpilih yang diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan pada masing-masing isu secara optimal, dan terkait dengan misi dan indikator makro yang hendak dicapai pada tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2007 meliputi :

1. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Peningkatan perekonomian daerah.
5. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik.
6. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

1). Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan kegiatan sektor riil

Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan diprioritaskan, maka program pada tahun 2007 yaitu :

- Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

- Pengembangan manajemen transportasi.

2). Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang pendidikan, kesehatan dan upaya penanganan masalah sosial, peningkatan layanan hak-hak dasar masyarakat . Untuk itu maka program peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu :

a. Pendidikan

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga
- Peningkatan prestasi olahraga

b. Kesehatan

- Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga
- Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi
- Penanganan penyakit menular dan tidak menular
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar
- Penyelenggaraan promosi kesehatan
- Peningkatan pelayanan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan

c. *Penanganan masalah sosial*

- Penyelenggaraan jaminan sosial
- Peningkatan tertib sosial
- Pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera
- Penanggulangan bencana

d. Peningkatan Layanan Hak-hak Dasar Masyarakat

- Peningkatan Kualitas kehidupan beragama.
- Peningkatan kualitas kehidupan politik.
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan.
- Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan
- Peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga

3). Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.

Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, diarahkan untuk menangani masalah banjir, persampahan dan pemukiman kumuh, dengan program pada tahun 2007 yaitu:

- Peningkatan jangkauan layanan air bersih
- Pengendalian banjir
- Perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan bangunan
- Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA
- Peningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPS
- Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup
- Penataan lingkungan pemukiman

4). Peningkatan perekonomian daerah.

Peningkatan perekonomian daerah diarahkan dengan program penataan investasi, pengelolaan pertanian perkotaan, pengembangan UKM, ketenagakerjaan, dan pengelolaan keuangan daerah, dengan program :

- Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM
- Pengembangan dan penataan pasar tradisional
- Peningkatan daya tarik investasi
- Peningkatan kualitas ketenagakerjaan
- Perlingdungan ketenagakerjaan
- Pengembangan usha industri rumah tangga, kecil dan menengah
- Pengembangan usaha perdagangan dan jasa
- Pengembangan agribisnis perkotaan
- Peningkatan pendapatan daerah
- Peningkatan pelestarian seni dan budaya
- Pengembangan obyek wisata

5). Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, baik dalam bentuk kemudahan pengurusan perizinan maupun perluasan jangkauan pelayanan. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik pada tahun 2007 diharapkan dapat melakukan persiapan pembentukan sistem pelayanan terpadu dan pemekaran kecamatan. Prioritas program yaitu:

- Peningkatan manajemen pelayanan
- Peningkatan integrasi pelayanan
- Peningkatan jangkauan pelayanan

6). Peningkatan kinerja pemerintahan daerah

Peningkatan kinerja pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) dimaksudkan untuk memfasilitasi peningkatan kinerja pemerintahan, baik melalui pendidikan dan latihan, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas perencanaan maupun penegakan produk-produk hukum. Prioritas program pada tahun 2007 yaitu:

- Peningkatan kualitas SDM pemerintahan daerah melalui diklat struktural dan fungsional
- Peningkatan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
- Peningkatan kualitas pengawasan
- Pengembangan kearsipan perpustakaan dan telematika
- Peningkatan kerjasama antar lembaga
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa
- Peningkatan peran dan fungsi legislatif
- Pengelolaan dan pengembangan aset daerah
- Peningkatan kualitas produk hukum daerah
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2007 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun masyarakat termasuk dunia usaha untuk wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas yang tertuang dalam bab terdahulu dalam RKPD ini.

RKPD Kota Depok tahun 2007 disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tahapan Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, dan Murenbang Tingkat Kota serta disesuaikan dengan Kebijakan Propinsi maupun Nasional, guna mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan. Untuk itu semua pelaksanaan kegiatan, baik dalam *"kerangka regulasi"* maupun dalam *"kerangka anggaran"* diisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD atau antar SKPD dengan tetap memperhatikan peran dan tanggungjawab berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kota tahun 2007, yaitu;

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat dan dunia usaha wajib untuk melaksanakan program-program RKPD Kota Depok tahun 2007.
2. Bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Depok, wajib untuk menjadikan RKPD Kota Depok tahun 2007 sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2007.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, dan setiap SKPD perlu membuat Rencana Kerja - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2007 sebagai berikut :
 - a. Uraian penggunaan APBD tahun anggaran 2007, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, dan berupa kerangka regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota ;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD tahun anggaran 2007, yang merupakan program, yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ;
 - c. Uraian rencana penggunaan APBD tahun anggaran 2007 harus juga menguraikan kewenangan penggunaan anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah maupun tugas dekonsentrasi yang diterima dari pemerintah propinsi dan pusat,

atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat;

- d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD tahun anggaran 2007 dari masing-masing SKPD yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.
4. Pemerintah daerah, dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok, dengan mendapat masukan dari Renja-SKPD merumuskan matrik indikasi program dan kegiatan tahun 2007 yang dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi dokumen RKPD Kota Depok tahun 2007;
5. Masyarakat luas dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan. Dalam hal pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program pembangunan, berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Peran masyarakat juga dimungkinkan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
6. Dalam membuat Renja SKPD, satuan kerja wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*) dan forum lintas pelaku, sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
7. Setiap SKPD di akhir tahun anggaran 2007 wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya kepada Walikota secara berkala 3 (tiga) bulanan yang meliputi :
 - a. Evaluasi terhadap rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2007;

- b. Evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007 dan peraturan-peraturan terkait lainnya;
 - c. Evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan;
8. Pemerintah Daerah, dengan dikoordinasikan Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Depok melakukan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur Jawa Barat;
 9. Setiap *stakeholders* wajib melaksanakan RKPD sebagai wujud komitmen bersama dalam mencapai Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dalam rangka pembangunan Kota Depok tahun 2007.
 10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2007 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Depok, dan menjadi dasar Kebijakan Umum APBD Kota Depok tahun 2007.

BAB VII *PENUTUP*

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok tahun 2007 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-undang, menyatakan bahwa RKPD Kota merupakan pedoman untuk menyusun rancangan APBD Kota.

Dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan RKPD Kota diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah Kota Depok dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda nasional.

Selanjutnya dengan RKPD Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota memiliki dokumen rencana kerja SKPD Kota (Renja-SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Dengan adanya RKPD Kota diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari misi Kota Depok, dapat lebih terarah dan mencapai sasaran.

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

